

Hasil Penelitian

STUDI DIAGNOSTIK TINGKAT PENERAPAN KULTUR TEKNIS KELAPA SAWIT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN SAWIT SWADAYA: STUDI KASUS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

(DIAGNOSTIC STUDY ON OIL PALM CULTIVATION PRACTICES LEVEL TO IMPROVE THE WELFARE OF PALM OIL INDEPENDENT SMALLHOLDERS: A CASE STUDY IN NORTH PADANG LAWAS DISTRICT, NORTH SUMATRA)

Zulfi Prima Sani Nasution, Ratnawati Nurkhoiry, Suroso Rahutomo

Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjend Katamsno No 51, Kampung Baru, Medan
email: zulfi.primasani@gmail.com

Diterima: 5 April 2019; Direvisi: 20 Juni 2019; Disetujui: 22 Juli 2019

ABSTRAK

Sejalan dengan berkembangnya pekebun swadaya, upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan mereka saat ini menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan. Kendala utama yang dihadapi oleh pekebun swadaya adalah produktivitas yang rendah, seperti yang dialami pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi praktik budidaya kelapa sawit yang dilakukan saat ini dan pengembangan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara. Studi ini dilakukan melalui survei dan wawancara mendalam yang melibatkan 40 petani swadaya yang tersebar di kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan, dan Halongonan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang benih kelapa sawit unggul dan praktik standar budidaya kelapa sawit telah menyebabkan hasil panen aktual hanya setengah dari potensi hasil kesesuaian lahan S3, terutama untuk pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, dan Halongonan Timur. Selain itu, proses penjualan tandan buah segar (TBS) yang tidak dikelola melalui organisasi pekebun (kelompok atau koperasi) menyebabkan rantai pemasaran TBS yang panjang, sehingga mengurangi pendapatan pekebun swadaya. Terbatasnya akses keuangan dari bank membebani pekebun swadaya dalam menerapkan praktik standar budidaya kelapa sawit, terutama pemupukan. Memperkuat peran pemerintah daerah, bank dan perusahaan perkebunan sangat diharapkan untuk mengubah pola pikir pekebun mengenai pentingnya menggunakan benih kelapa sawit unggul, mengadopsi praktik-praktik terbaik budidaya kelapa sawit, membuka akses keuangan, dan memperkuat kelembagaan pekebun sehingga kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pekebun swadaya di Kabupaten Lawas Padang Utara dapat segera direalisasikan.

Kata kunci: pekebun swadaya, produktivitas, kelapa sawit, Padang Lawas Utara

ABSTRACT

In line with the growth of independent smallholders, efforts to increase their productivity and sustainability are now a concern for policymakers. The main obstacle faced by independent smallholders is the low yield, as experienced by independent smallholders in North Padang Lawas District, North Sumatra. This study aims to determine the current conditions of oil palm cultivation practices and develop policy recommendations to increase oil palm yield in North Padang Lawas District. The study was carried out through surveys and in-depth interviews involving 40 independent smallholders spread across the sub-district of Padang Bolak, Portibi, Halongonan, and Halongonan Timur. The results showed that lack of knowledge about oil palm certified seeds and standard practices of oil palm cultivation had caused the actual yield was only half of the potential yield of land suitability S3, especially for independent smallholders in the sub-district of Padang Bolak, Portibi, and Halongonan Timur. In addition, the process of selling

fresh fruit bunches (FFB) that were not managed through farmer organizations (groups or cooperatives) caused a long chain of FFB marketing, thereby reducing the smallholder's income. Limited access to finance from banks burdened smallholders in implementing standard practices of oil palm cultivation, especially fertilization. Strengthening the role of local governments, banks and plantation companies are expected to change the mindset of smallholders regarding the importance of using legitimate oil palm seeds, adopting the best practices of oil palm cultivation, opening access to finance, and strengthening smallholders institutions so that the welfare and sustainability of independent smallholders in North Padang Lawas District can be realized soon.

Keywords: independent smallholders, yield, oil palm, North Padang Lawas

PENDAHULUAN

Perkembangan perkebunan rakyat kelapa sawit yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir ternyata belum diikuti dengan meningkatnya pengetahuan pekebun tentang praktik budidaya terbaik (Best Management Practices) (Purba et al., 2014). Secara nasional, capaian produktivitas perkebunan rakyat kelapa sawit Indonesia hanya 3,3 ton CPO/ha atau kurang dari 50% potensi bahan tanaman unggul (Ditjenbun, 2018).

Sebagian perkebunan rakyat mudah dikenali dari kondisi kebun yang tidak terawat, pohon-pohon yang menunjukkan gejala kekurangan hara serta tandan-tandan yang dipanen sebelum waktunya matang. Meskipun di sekitar perkebunan rakyat dijumpai perusahaan negara ataupun perusahaan swasta, namun alih teknologi kultur teknis budidaya kelapa sawit yang standar sering kali belum diterapkan. Hal lainnya adalah penggunaan bibit illegitim/asalan, yaitu bibit yang diperoleh dari pengedar benih yang tidak bertanggung jawab atau dibuat sendiri dengan mengambil benih dari tanaman sembarang (Vermeulen dan Goad, 2006).

Faktor kesesuaian lahan untuk budidaya kelapa sawit sering kali masih kurang dipahami oleh pekebun rakyat. Banyak pekebun yang menanam kelapa sawit di areal berbukit – bergunung, di lahan gambut dalam, atau pada tanah pasir. Pekebun mencoba mengikuti budidaya kelapa sawit yang dilakukan perusahaan besar, namun karena terbatasnya modal dan teknologi menyebabkan faktor pembatas lahan tidak dikelola dengan baik dan justru kebun kelapa sawit tersebut seringkali akhirnya terbenkakai (Lee et al., 2014).

Selain itu keterbatasan permodalan membuat pekebun tidak bisa mengusahai lahan yang cukup luas, atau walaupun luas maka letaknya terpencar-pencar sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya. Lahan sempit ini terkadang juga dimanfaatkan untuk tanaman keras lainnya sehingga produksi kelapa sawit menjadi tidak optimal (Purba et al., 2014). Rendahnya hasil produksi setiap kali panen (umumnya dua minggu sekali) umumnya mengharuskan pekebun menjual hasil panen kepada para tengkulak yang kemudian

menjualnya kembali kepada pedagang pengumpul besar atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) (Nasution et al., 2014).

Hal ini tentu saja menimbulkan disparitas harga antara harga yang diterima pekebun dengan harga yang dibayarkan oleh PKS. Ditengarai bahwa pendapatan pekebun dari menjual tandan sawit tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sehingga pekebun melakukan pekerjaan sampingan lainnya (Lee et al., 2014; Purba et al., 2014). Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu wilayah pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit di Sumatera Utara yang terdiri dari 9 kecamatan dengan total luas areal mencapai 27.225 ha. Rerata produktivitas perkebunan sawit swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tergolong rendah yaitu sebesar 769,72 kg/ha/bulan (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2017), memerlukan pendekatan terencana untuk penanganan masalah tersebut. Namun, terbatasnya data empiris mengenai karakteristik pekebun, kondisi praktik budidaya terkini dan tantangan lainnya melemahkan upaya pemerintah Kab. Padang Lawas Utara dalam menyusun program-program perbaikan dengan pendekatan yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui karakteristik pekebun swadaya; b) mengetahui tingkat penerapan kultur teknis dan capaian produksi sawit di tingkat pekebun swadaya; dan, c) menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan produktivitas pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara.

METODE

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara pada April-Agustus 2018. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan luas areal perkebunan rakyat dan jumlah pekebun di setiap kecamatan serta posisi kecamatan di Kabupaten Paluta. Empat kecamatan terpilih menjadi lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, Kecamatan Halongonan dan Kecamatan Halongonan Timur.

Sampel pekebun swadaya juga dipilih secara *purposive* sejumlah 10 (sepuluh) orang

pekebun per kecamatan dengan pertimbangan terbatasnya informasi data pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sepuluh orang pekebun tersebut berasal dari empat desa di setiap kecamatan terpilih. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilengkapi kuesioner terstruktur.

Tabel 1. Sampel penelitian

No.	Kecamatan	Jumlah Pekebun (Orang)	Sampel
1.	Padang Bolak	10	
2.	Portibi	10	
3.	Halongonan	10	
4.	Halongonan Timur	10	
Jumlah		40	

Tabel 2. Indikator penilaian

Indikator	Keterangan
1. Pembangunan kebun	1. Pembangunan kebun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status lahan ▪ Sumber benih dan benih yang digunakan
2. Penerapan kultur teknis	2. Penerapan kultur teknis <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikasi pemupukan, penunasan, Pengendalian OPT ▪ Pelaksanaan panen dan pengendalian gulma
3. Pemasaran hasil produksi	3. Pemasaran hasil produksi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah produksi dan tujuan pemasaran ▪ Lama waktu penjualan hasil produksi ▪ Cara pembayaran hasil produksi

Sumber: Molenaar *et al.*, 2013

Pengelompokan pekebun dilakukan berdasarkan kepemilikan lahan, yaitu: (1) lahan sempit l; (2) lahan sedang; dan, (3) lahan luas, yang didefinisikan sebagai berikut (Adnyana dan Suhaeti, 2003):

- 1) Kepemilikan lahan sempit = kepemilikan lahan $\leq \mu - \frac{1}{2}$ stdev
- 2) Kepemilikan lahan sedang = $\mu - \frac{1}{2}$ stdev < kepemilikan lahan $\leq \mu + \frac{1}{2}$ stdev
- 3) Kepemilikan lahan luas = kepemilikan tanah $\geq \mu + \frac{1}{2}$ stdev

Catatan: μ adalah jumlah rata-rata kepemilikan lahan; stdev adalah standar deviasi kepemilikan lahan

Data hasil wawancara dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabulasi dan gambar. Pengukuran variabel-variabel penelitian dinyatakan dalam nilai rerata atau persentase. Analisis tingkat penerapan kultur teknis kelapa sawit di tingkat pekebun swadaya dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan mengadopsi pendekatan Molenaar *et al.*, (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Kebun. Kemudahan teknis budidaya menjadi alasan utama pekebun menanam kelapa sawit mengingat sebagian besar di antara mereka sebelumnya mengusahakan tanaman pangan. Kemudahan teknis budidaya tersebut disimpulkan pekebun dari pengalaman bekerja di perusahaan swasta atau dari pekebun lain yang telah lebih dulu menanam kelapa sawit. Di Halongonan Timur, pekebunnya relatif beruntung karena 80% diantaranya pernah bekerja dan mendapat pengetahuan budidaya sawit dari PT. Torganda, sebuah perusahaan perkebunan swasta yang beroperasi di Kab. Padang Lawas Utara.

Sebagian besar pekebun yakni 7 (tujuh) orang pekebun (70%) di Kecamatan Padang Bolak, 6 (enam) orang pekebun (60%) di Kecamatan Portibi dan 5 (lima) orang pekebun (50%) di Kecamatan Halongonan mengaku belajar dari mencoba sendiri (*learning by doing*) dan sebagian lagi mengaku belajar dari teman yang telah lebih dulu menanam sawit. Meskipun demikian, kurangnya informasi tentang bibit unggul menyebabkan banyak pekebun tertipu saat membeli bibit sawit.

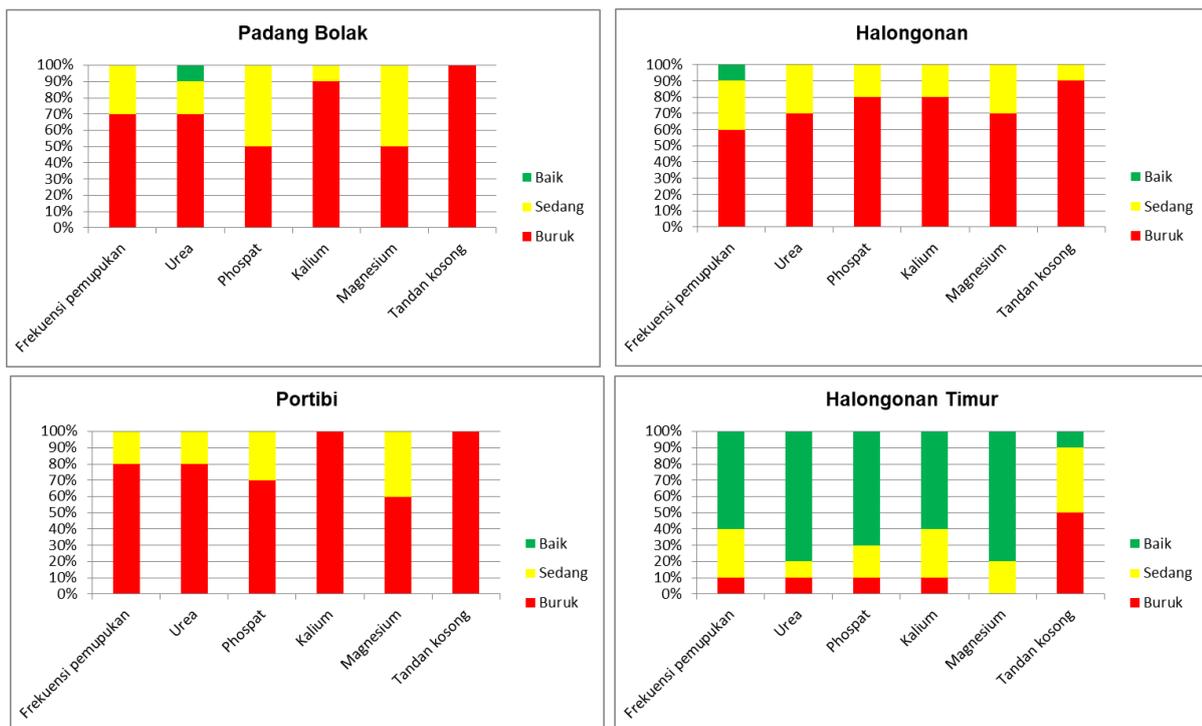
Sebanyak 9 orang pekebun (90%) di Kecamatan Padang Bolak, 9 (sembilan) orang pekebun (90%) di Kecamatan Portibi, dan 8 (delapan) orang pekebun (80%) pekebun di Kecamatan Halongonan mengaku menggunakan benih yang dibuat sendiri ataupun yang tidak jelas asal usulnya. Para pekebun di Kecamatan Halongonan Timur cukup beruntung dengan menanam bibit dari sumber yang terpercaya yang diperoleh dari PT. Torganda.



Gambar 1. Hasil segregasi buah di kebun salah satu pekebun swadaya di Kecamatan Portibi, 3 (tiga) tipe kelapa sawit teridentifikasi bersamaan di dalam satu areal kebun, yaitu: Tenera (kiri), Pisifera (tengah) dan Dura (kanan)

Penerapan Kultur Teknis. Meskipun kemudahan interaksi dengan berbagai pihak telah memungkinkan pekebun untuk mengetahui teknologi budidaya kelapa sawit lebih mudah, namun pekebun rakyat umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola kebun mereka (Vermeulen dan Goad, 2006). Pendampingan pekebun oleh penyuluh pertanian dan perkebunan di Kabupaten Padang Lawas Utara belum maksimal dilakukan, mengingat selama ini para penyuluh pertanian

lebih fokus pada kegiatan swasembada pangan Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale). Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman petani dalam hal benih unggul, penentuan jenis dan dosis pemupukan serta standar kegiatan pemeliharaan kebun. Gambar 2 memperlihatkan pemupukan masih belum tepat dalam hal frekuensi, aplikasi, pemilihan jenis pupuk dan keseimbangan hara (sebagian unsur hara berlebih sementara yang lain kurang).



Gambar 2. Praktik pemupukan tanaman pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Halongonan, Portibi, dan Halongonan Timur, ditinjau dari aspek frekuensi pemupukan dan jenis pupuk yang diaplikasikan

Sebagian besar pekebun mengaku bahwa mereka menentukan sendiri dosis pupuk yang diaplikasikan di lahan, sebagian lainnya mendapat informasi dari pekebun lain. Hanya pekebun di Kecamatan Halongonan Timur yang mengaku memupuk berdasarkan informasi rekomendasi pemupukan dari PT. Torganda. Gambar 2 juga memperlihatkan bahwa pekebun di Halongonan Timur lebih intensif dalam hal pemupukan. Sekitar 60% pekebun di Kecamatan Halongonan Timur mengaku telah melakukan pemupukan 2 kali setahun, dan hanya 10% yang mengaku tidak melakukan pemupukan sepanjang tahun 2018.

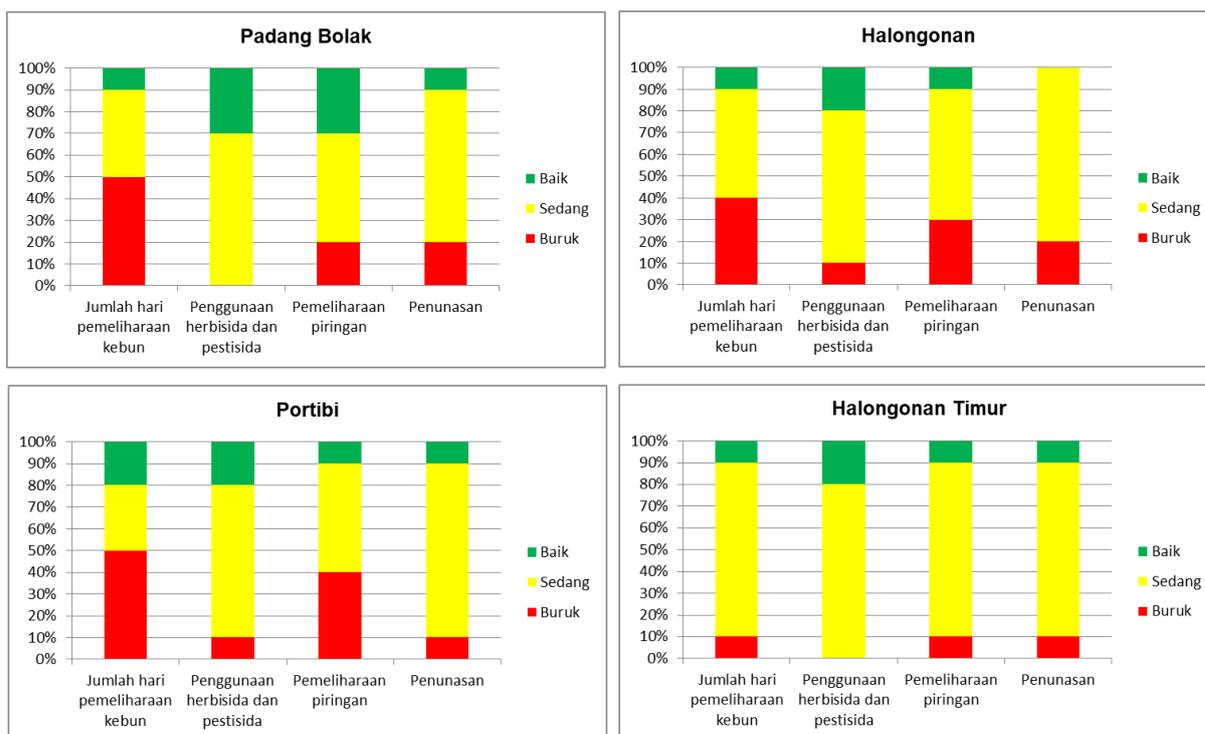
Hal ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan 70% pekebun Padang Bolak, 80% pekebun Portibi dan 60% pekebun Halongonan yang mengaku tidak memupuk kebun sawit mereka sepanjang tahun 2018. Terus meningkatnya harga pupuk dan ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu menjadi alasan utama pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara tidak melakukan pemupukan.

Pengalaman dan pemahaman terhadap budidaya sawit sejalan dengan perhatian pekebun dalam pemeliharaan kebunnya, yang terlihat dari jumlah hari pekebun untuk memelihara kebunnya. Hanya pekebun di

Kecamatan Halongonan Timur yang tergolong baik dalam melakukan pemeliharaan kebun (lebih dari 3 hari dalam sebulan). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pekebun di Kecamatan Padang Bolak, Portibi dan Halongonan yang tergolong buruk.

Pengendalian gulma di gawangan dan piringan dilakukan pekebun menggunakan herbisida seperti Gramoxon dengan frekuensi 2 kali setahun. Penunasan pelepah pada sebagian besar kebun swadaya dapat dikatakan tergolong sedang, yaitu 1 kali dalam setahun dengan tetap mempertahankan jumlah pelepah segar di pohon dan penyusunan pelepah tunasan di gawangan.

Data produksi pada penelitian ini diperoleh hanya berdasarkan wawancara pekebun yang terbatas mempunyai tanaman sawit dengan umur tertentu, namun tetap dapat dijadikan salah satu indikator masih rendahnya produksi kelapa sawit pekebun swadaya. Pada rentang umur produksi tinggi (7-17 tahun), rata produktivitas kebun di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Halongonan Timur berturut-turut hanya 40%, 45%, 50% dan 70% dibandingkan dengan standar produktivitas kelas lahan S3 yang dikeluarkan oleh PPKS (Tabel 2).



Gambar 3. Praktik pemeliharaan kebun pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Halongonan, Portibi dan Halongonan Timur dari aspek jumlah hari pemeliharaan kebun, penggunaan herbisida dan pestisida, pemeliharaan piringan dan penunasan

Tabel 3. Produktivitas tanaman kelapa sawit pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Halongonan Timur

Umur Tanaman	Produktivitas (ton TBS/ha/tahun)				Produktivitas Kelas Lahan S3
	Padang Bolak	Portibi	Halongonan	Halongonan Timur	
4	5,1	5	-	-	12
5	8,6	7,5	10,75	-	15
6	7,85	7	7,5	-	19
7	9,3	7,5	9,1	15,5	23
8	-	-	13,9	-	26
9	14,7	-	15,7	20	27
10	-	12	14,4	-	28
11	9,5	-	7,25	-	29
12	-	-	16	18,5	30
13	-	11,4	-	-	30
14	14	-	15,7	19	29,5
15	-	10,2	14,8	-	28,5
16	16,8	10,5	14,7	21	27
17	10,9	-	-	-	26
18	-	-	-	21	25
19	12,5	-	-	20	24
20	-	-	-	21	23
21	16	-	-	-	22
22	-	-	-	19	21
23	-	-	-	19,5	20

Sumber: data primer (diolah)

Produktivitas kelapa sawit pekebun swadaya di Halongonan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya berhubungan dengan lebih intensifnya penggunaan input produksi terutama pupuk dan pengalaman berkebun yang lebih mendalam terutama dari pengalaman bekerja di PT. Torganda. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Purba *et al.*, 2014 dimana produktivitas kebun pekebun swadaya di Kabupaten Aceh Selatan, Pasaman Barat-Dharmasraya, dan Bengkulu Utara berturut hanya mencapai 48%, 49% dan 70% dari produktivitas lahan S3. Hasil serupa juga dijelaskan Euler *et al.*, (2016) bahwa pekebun rakyat di Sumatera hanya mendapatkan hasil panen sebesar 56% dari potensi hasil panen perkebunan sawit.

Pemasaran Hasil Produksi. Rendahnya penggunaan input produksi yang kemudian berdampak kepada rendahnya produktivitas kemungkinan juga disebabkan oleh keterbatasan modal usaha pekebun (Papenfus, 2002). Modal awal pekebun untuk berkebun kelapa sawit umumnya bersumber dari modal pribadi, demikian juga dengan biaya pemeliharaan dan pengadaan input lainnya. Hal inilah yang menyebabkan besarnya persentase pekebun yang mengaku tidak melakukan pemupukan sepanjang 2018, yaitu 70% di

Kecamatan Padang Bolak, 80% di Kecamatan Portibi dan 60% di Kecamatan Halongonan.

Rotasi panen merupakan salah satu faktor penting dalam capaian produktivitas lahan dan pendapatan pekebun rakyat (Lee *et al.*, 2014; Euler *et al.*, 2016). Secara umum, rotasi panen buah tergolong sedang yakni 2 kali sebulan khususnya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi dan Halongonan. Rotasi panen yang lebih baik dilakukan oleh pekebun di Kecamatan Halongonan Timur. Kepemilikan lahan yang lebih luas (rata-rata 12 ha) menjadi faktor utama rotasi panen yang lebih baik.

Pekebun di Kecamatan Halongonan Timur juga memiliki koperasi/keompok tani yang tergolong aktif, sementara pekebun di kecamatan lainnya umumnya menjual TBS melalui agen buah yang kemudian mengumpulkannya kepada pemilik ramp untuk dijual ke PKS. Ketiadaan koperasi/keompok tani yang berperan dalam pemasaran bersama hasil panen menyebabkan rendahnya harga yang diterima pekebun di Kecamatan Padang Bolak, Portibi dan Halongonan.

Pada saat survei dilakukan, rata-rata pekebun menerima harga TBS dari agen buah berkisar Rp 800-950/kg TBS, sedangkan pekebun di Halongonan Timur dapat menerima harga yang 24-27% lebih tinggi sekitar Rp1.100-Rp1.250/kg TBS. Hal ini sejalan dengan Nasution *et al.*, (2014) yang mengkaji efisiensi

pemasaran TBS pekebun swadaya di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pekebun swadaya yang menjual TBS langsung ke PKS menerima harga 6-17% lebih tinggi dibandingkan pekebun swadaya yang menjual melalui agen buah. Hasil penelitian tersebut juga

sejalan dengan Moolenaar *et al.*, (2013) yang menjelaskan bahwa pekebun swadaya yang menjual TBS langsung ke PKS menerima harga 16% lebih tinggi dibandingkan menjual melalui agen buah dan 5% lebih tinggi dibandingkan menjual melalui koperasi.



Gambar 4. Praktik panen dan transportasi pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Halongonan, Portibi dan Halongonan Timur

Tabel 4. Distribusi kepemilikan lahan sawit pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Halongonan Timur

No	Pengelompokkan Pekebun	Rang e (Ha)	Rerat a (Ha)	(%)
Padang Bolak				
1	Pekebun Lahan Sempit (≤ 2 Ha)	0,5-2	1,5	50
2	Pekebun Lahan Sedang ($> 2 - 6$ Ha)	2,1-5,5	3,4	50
3	Pekebun Lahan Luas (> 6 Ha)	-	-	-
Portibi				
1	Pekebun Lahan Sempit (≤ 2 Ha)	0,5-2,0	1,5	50
2	Pekebun Lahan Sedang ($> 2 - 6$ Ha)	2,5-6,0	3,8	40

3	Pekebun Lahan Luas (> 6 Ha)	6,5	6,5	10
Halongonan				
1	Pekebun Lahan Sempit (≤ 2 Ha)	1,0-2,0	1,5	20
2	Pekebun Lahan Sedang ($> 2 - 6$ Ha)	2,2-6,0	3,6	50
3	Pekebun Lahan Luas (> 6 Ha)	6,2-10,5	7,5	30
Halongonan Timur				
1	Pekebun Lahan Sempit (≤ 2 Ha)	1,0-2,0	1,8	20
2	Pekebun Lahan Sedang ($> 2 - 6$ Ha)	2,25 - 6,0	3,0	20
3	Pekebun Lahan Luas (> 6 Ha)	7,0-45,0	12,6	60

Sumber: data primer, diolah

Kondisi Sosial Ekonomi. Luas lahan yang diusahakan untuk berkebun sawit juga menjadi faktor penentu pendapatan rumah tangga pekebun. Pekebun kelapa sawit Halongonan Timur memiliki lahan lebih luas dibandingkan pekebun di lokasi lainnya, mengingat para pekebun di wilayah tersebut telah lebih dulu menanam sawit. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa di Kecamatan Padang Bolak dan Portibi, luas kepemilikan lahan kebun tersebar cukup merata dalam kategori lahan sempit (< 2 ha) dan lahan sedang (2-6 ha).

Pendapatan pekebun kelapa sawit sangat bergantung pada besaran luas lahan kelapa sawit yang diusahakan dan juga pekerjaan lain yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebanyak 35-43% pekebun di Kecamatan Padang Bolak, 28-58% pekebun di Kecamatan Portibi, 33-53% pekebun di Kecamatan Halongonan dan 50-62% pekebun di Kecamatan Halongonan Timur mengatakan sawit sebagai sumber pendapatan utama. Tabel

5 memperlihatkan bahwa proporsi pendapatan pekebun yang diperoleh dari sawit tergolong lebih besar dibanding pendapatan dari kegiatan non sawit. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang dimiliki pekebun, maka semakin besar kontribusi sawit terhadap pendapatan rumah tangga yang diperoleh pekebun setiap bulan.

Pendapatan pekebun setiap bulan dari sawit bervariasi dari Rp855 ribu-Rp1,9 juta di Kecamatan Padang Bolak, Rp850 ribu-Rp3,7 juta di Kecamatan Portibi, Rp855-Rp4,2 juta di Kecamatan Halongonan dan Rp2,9 juta-Rp20,7 juta di Kecamatan Halongonan Timur. Diketahui bahwa lebih dari 60% pendapatan pekebun ternyata dibelanjakan untuk keperluan non-pangan dan semakin tinggi pendapatan pekebun maka proporsi belanja non pangan tersebut juga semakin besar. Di antara belanja non pangan yang tergolong tinggi adalah biaya kredit dan arisan.

Tabel 5. Tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pekebun di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Halongonan Timur (Rp 000)

Kelompok Lahan	Pendapatan (Rp/Bln/KK)			Proporsi Pendapatan (%)		Pengeluaran (Rp/Bulan/KK)		
	Sawit	Non Sawit	Total	Sawit	Non Sawit	Pangan	Non Pangan	Total
Padang Bolak								
Sempit ≤ 2,00 ha	855	1.556	2.411	35	65	1.000	1.317	2.317
Sedang > 2,00-6,00 Ha	1.938	2.570	4.508	43	57	1.585	3.570	1.585
Luas > 6,00 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-
Portibi								
Sempit ≤ 2.00 ha	855	2.150	3.005	28	72	1.340	1.557	2.897
Sedang > 2.00-6.00 Ha	2.166	1.545	3.711	58	42	1.750	2.413	4.164
Luas > 6 Ha	3.705	3.870	7.575	49	51	2.250	4.369	6.620
Halongonan								
Sempit ≤ 2.00 ha	855	1.750	2.605	33	67	1.425	1.675	3.100
Sedang > 2.00-6.00 Ha	2.052	3.150	5.202	39	61	1.987	2.325	4.312
Luas > 6 Ha	4.275	3.825	8.100	53	47	2.435	3.255	5.690
Halongonan Timur								
Sempit ≤ 2.00 ha	2.970	2.953	5.923	50	50	2.136	1.861	3.997
Sedang > 2.00-6.00 Ha	4.950	4.376	9.326	53	47	2.664	3.645	6.309
Luas > 6 Ha	20.790	12.735	33.525	62	38	4.265	18.059	22.324

Sumber: data primer (diolah)

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budidaya kelapa sawit telah menjadi strategi mata pencaharian yang penting bagi masyarakat pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil penelitian menjelaskan berbagai permasalahan umum yang dihadapi pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Masalah rendahnya produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan berbagai faktor pembatas memerlukan peran dari pemerintah daerah, perbankan dan perusahaan swasta untuk mengatasinya.

REKOMENDASI

Beberapa strategi yang direkomendasikan untuk peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. Mengubah pola pikir pekebun agar menggunakan bibit sawit unggul dan mengadopsi praktik budidaya sawit sesuai standar melalui pendampingan dari pihak penyuluh pertanian/perkebunan dan Dinas Perkebunan Kabupaten yang bekerjasama dengan perusahaan perkebunan swasta setempat sebagai salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*
2. Penyediaan program pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan oleh pihak perbankan,
3. Penguatan kelembagaan pekebun dengan membentuk kelompok atau koperasi pekebun yang didampingi oleh Dinas Koperasi Kabupaten.

Strategi tersebut diharapkan dapat menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pekebun swadaya Kab. Padang Lawas Utara di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, Made Oka and R.N. Suhaeti. 2003. Penerapan Indeks Gini Untuk Mengidentifikasi Tingkat Pemerataan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan di Wilayah Jawa dan Bali. *Jurnal SOCA (Socio-Economic of Agriculture)* 3(2) hal. 1-13.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2017. *Statistik Perkebunan*. Medan: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Ditjenbun. 2018. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Ditjenbun.

Euler, M., Hoffmann, M. P., Fathoni, Z., and Schwarze, S. 2016. Exploring yield gaps in smallholder oil palm production systems in eastern Sumatra, Indonesia. *Agricultural Systems*, 146, pp 111-119.

Lee, J. S. H., Ghazoul, J., Obidzinski, K., Koh, L.P. 2014. Oil palm smallholder yields and incomes constrained by harvesting practices and type of smallholder management in Indonesia. *Agronomy for Sustainable Development*, 34 (2) : 501-513. Springer.

Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S., Taylor, C., & Harms, J. 2013. *Diagnostic study on Indonesian oil palm smallholders: developing a better understanding of their performance and potential*. International Finance Corporation, World Bank Group.

Nasution, Z.P.S., Rizki Amalia., dan Teguh Wahyono. 2014. Analisis Efisiensi Pemasaran Tandan Buah Segar. Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit* 22(3) hal. 153-163.

Papenfus, M.M. 2002. Investing in Oil Palm : An Analysis of Independent Smallholder Oil Palm Adoption in Sumatera, Indonesia. *Southeast Asia Policy Research Paper Working Paper* No. 15. ICRAF. Bogor. Indonesia.

Purba, A.R., Z.P.S. Nasution., R. Amalia, and T. Wahyono. 2014. Profile of Sumateran Oil Palm Smallholders. *Proceeding IOPC 2014*. Bali Nusa Dua.

Vermeulen, Sonja and N. Goad. 2006. *Towards Better Practice in Smallholder Palm Oil Production*. London, United Kingdom: International Institute for Environment and Development.